Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi

Susilawati
Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi

Abstrak

Economic growth of districts in Jambi Province during the period 2004-2013 varied enough. This indicate that there are the disparities economic development between regions. This research aims to analyze disparities economic development in terms of regional income disparities and how the correlation between economic growth and the disparities of economic development during the period 2004-2013. The analysis used Williamson Index and Pearson Correlation as the instrument. From the research note that economic development disparities between districts in Jambi Province are moderate and correlations between economic growth and the disparities of economic development are weak and negative. To reduce disparities of economic development occuring need the strategic policies of the regional development for all of regions.

Kata Kunci : *Disparities of economic development, economic growth, regional income.*

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan dalam kebijakan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemajuan antar daerah, melalui pembangunan serasi dan terpadu antar sektor pembangunan daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah. Kunci pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien dan efektif adalah perencanaan, koordinasi, dan keterpaduan antar sektor. Pembangunan sektoral di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan distribusi pendapatan tidak merata, terjadi kesenjangan pendapatan antar masyarakat dan berpengaruh terhadap perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya akan menimbulkan berbagai kecemburuan pada masing-masing anggota masyarakat itu sendiri.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses kerja antara Pemerintah Daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad,1999;Blakely,1989 dalam Kuncoro, 2004;127). Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor (Kuncoro,2004;127).

Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang

juga diartikan sebagai peningkatan pendapatan per kapita merupakan suatu proses kenaikan output per kapita yang diukur dan dihitung dalam kurun waktu tertentu. Strategi pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi ternyata menimbulkan kemiskinan yang membengkak, Ketimpangan pendapatan yang semakin besar dan tingkat pengangguran bertambah. Hal ini terjadi karena pendapatan per kapita tidak menggambarkan pendistribusian hasil yang merata dalam penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan. Hasil pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan akan terkonsentrasi hanya pada sekelompok masyarakat. Sebagian daerah mencapai pertumbuhan cepat, sedangkan beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Kemajuan yang dicapai tiap daerah tidaklah sama, hal ini dikarenakan tiap daerah memiliki sumber daya yang berbeda. Selain itu para penanam modal cenderung memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas lengkap termasuk keahlian dan keterampilan sumber daya manusia yang tersedia sebagai lokasi investasinya.

Tabel 1
Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004-2013

Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan ekonomi (%)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kerinci	5,89	5,86	5,88	5,89	5,69	6,51	6,44
Merangin	7,02	5,99	8,42	7,85	7,02	6,47	6,45
Sarolangun	7,27	7,62	7,99	10,1	8,8	7,82	7,77
Batang Hari	5,6	6,24	5,14	6,05	7,9	7,11	6,84
Muaro Jambi	4,97	5,31	5,52	4,09	7,02	7,55	7,69
Tanjung Jabung Timur	4,71	5,71	5	5,78	6,83	7,44	4,09
Tanjung Jabung Barat	7,97	5,99	6,39	6,87	7,85	7,68	7,55
Tebo	5,95	6,08	5,01	5,96	6,78	6,52	6,51
Bungo	8,8	11,13	6,39	6,73	7,68	7,51	7,48
Kota Jambi	7,16	6,14	6,47	6,66	6,97	7,05	7,76
Kota Sungai Penuh	5,99	5,61	6,3	6	6,73	6,87	6,92
Prov. Jambi	**6,82**	**7,16**	**6,39**	**7,36**	**8,54**	**7,44**	**7,88**

Sumber : Tinjauan Ekonomi Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi (beberapa terbitan)

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi Jambi sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDRB) selama sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuasi sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Dari tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota se Provinsi Jambi cukup bervariasi. Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sebesar 7,95 %, sedangkan kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari seluruh kabupaten/kota yang ada, hanya Kabupaten Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat yang pertumbuhan ekonominya diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.

Hingga tahun 2007 Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi diantara seluruh kabupaten/kota se provinsi Jambi, kondisi ini berubah pada tahun 2008 dimana kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Bungo, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota tersebut berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, yaitu sebesar 7,88 %.

Bervariasinya pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut mengindikasikan bahwa antar kabupaten/ kota terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi yang dapat diperkirakan terdapat pula perbedaan distribusi pendapatan. Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antardaerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional antardaerah semakin besar.

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/ kota di Provinsi Jambi. Masalah dibatasi pada ketimpangan pembangunan ekonomi ditinjau dari sisi pendapatan selama periode tahun 2004-2013. Penelitian ini bertujuan : *pertama*, menganalisis ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *Kedua* menganalisishubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah

tersebut selama periode waktu penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan pengalokasian dana pembangunan kabupaten/ kota sesuai kondisi alamnya yang dapat dikembangkan. Untuk mencapai tujuan penelitian alat yang digunakan adalah Indeks Williamson dan Korelasi Pearson.

LANDASAN TEORI

Pembangunan (development) dapat diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama untuk menciptakan atau mempertahankan kenaikan pendapatan nasional bruto atau GNI (*Gross National Income*) tahunan pada tingkat yang lebih tinggi. Salah satu indeks ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (*income per capita*) atau GNI per kapita. Indeks ini pada dasarnya mengukur kemampuan suatu negara untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebih cepat daripada tigkat pertumbuhan penduduknya. Tingkatan dan laju pertumbuhan GNI per kapita riil (yakni, pertumbuhan GNI per kapita dalam satuan moneter dikurangi dengan tingkat inflasi) sering digunakan untuk mengukur sejauhmana kemakmuran ekonomis suatu bangsa secara keseluruhan, yaitu seberapa banyak barang dan jasa-jasa riil yang tersedia bagi rata-rata penduduk untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi (Todaro dan Smith, 2006:19)

Tiga komponen pertumbuhan ekonomi yang mempunyai arti penting bagi setiap masyarakat adalah akumulasi modal dan tenaga kerja, serta kemajuan teknologi. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui perbaikan di bidang kesehata, pendidikan, dan keterampilan. Pertumbuhan jumlah penduduk dan yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja. Kemajuan teknologi, yang secara luas diterjemahkan sebagai cara baru untuk menyelesaikan pekerjaan (Todaro dan Smith, 2006:118).

Tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Dengan demikian pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial , sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Streeten dalam Todaro dan Smith (2006:124) menyatakan bahwa konsep pembangunan harus didefinisikan kembali sebagai upaya menghapuskan berbagai bentuk masalah umat manusia: malnutrisi (kekurangan gizi), penyakit , penyakit buta huruf, daerah-daerah pemukiman kumuh, pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Jika hanya dihitung berdasarkan tingkat pertumbuhan agregat, maka mungkin pembangunan yang sudah dijalankan selama ini telah membawa keberhasilan pembangunan yang sudah dijalankan selama ini telah membawa keberhasilan besar. Tetapi apabila diukur atas dasar jumlah kesempatan kerja, peningkatan keadilan sosial dan pemberantasan kemiskinan, pembangunan selama ini tidak banyak membuahkan hasil, atau bahkan telah gagal.

Para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan, yang keduanya digunakan untuk tujuan analisis dan kuantitatif, yaitu distribusi pendapatan perseorangan atau distribusi ukuran pendapatan dan distribusi pendapatan fungsional atau pangsa distribusi pendapatan per faktor produksi (Todaro dan Smith, 2006:234). Distribusi pendapatan perseorangan (*personal distribution of income*) atau distribusi ukuran pendapatan (*size distribution of income*) merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh setiap individu atau rumah tangga.Apa yang diperhatikan disini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli darimana sumbernya, entah itu hanya berasal dari gajinya karena bekerja, atau berasal dari sumber yang lain seperti bunga tabungan, laba, hasil sewa, hadiah ataupun

warisan. Selain itu lokasi sumber penghasilan (desa atau kota), maupun sektor atau bidang kegiatan yang menjadi sumber penghasilan (pertanian, manufaktur, perdagangan, jasa) juga diabaikan.

Ukuran distribusi pendapatan kedua yang lazim digunakan oleh kalangan ekonom adalah distribusi pendapatan fungsional atau pangsa distribusi pendapatan per faktor produksi (*functional or factor share distribution of income*). Ukuran ini berfokus pada bagian dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja, dan modal). Teori distribusi pendapatan fungsional ini pada dasarnya mempersoalkan persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual, dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga dan laba (masing-masing merupakan perolehan dri tanah, modal uang dan modal fisik). Walaupun individu-individu tertentu mungkin saja menerima seluruh hasil dari segenap sumber daya tersebut, tetapi hal ini bukan merupakan perhatian dari analisis pendekatan fungsional ini.

Williamson dalam Kuncoro (2004:133) meneliti hubungan antara disparitas regional dan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antardaerah dan disparitas berkurang dengan signifikan.

Di Indonesia, masalah ketimpangan ekonomi antar daerah tidak hanya tampak pada wajah ketimpangan perekonomian Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa melainkan juga antar Kawasan Barat Indonesia (Kabarin) dan Kawasan Timur Indonesia (Katimin). Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani ketimpangan antar daerah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai. Alokasi penganggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tersebut tampaknya perlu lebih diperhatikan di masa mendatang. Strategi alokasi anggaran itu harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasioanl sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional (Majidi dalam Kuncoro 2002:133).

Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa akumulasi modal, keterampilan tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas tersebut, Ardani (1992) mengemukakan bahwa kesenjangan/ketimpangan antardaerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

Namun demikian, menurut Myrdal dalam Kuncoro (2006:133) perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antardaerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukan menurun, sehingga mengakibatkan ketimpangan antar daerah.

Oleh karena itu, menurut Djohanputro (2006:77) pemerataan menjadi isu penting karena setiap penduduk menginginkan dapat menikmati hasil pembangunan semaksimal mungkin. Bila setiap pihak berharap dapat menikmati hasil yang maksimal, maka hasil pembangunan yang merata merupakan hasil terbaik. Pemerataan dirasakan semakin penting setelah beberapa dekade pembangunan ternyata aspek pemerataan dianaktirikan. Pemerintah lebih menekankan aspek pertumbuhan ekonominya.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah masalah ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang

ditinjau dari ketimpangan pendapatan regional antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data runtun waktu dari tahun 2004 sampai tahun 2013, yang meliputi data pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Adapun alat analisis yang digunakan untuk adalah Indeks Williamson dan Korelasi Pearson.

Indeks Ketimpangan Williamson (Syafrizal dalam Kuncoro, 2006:133)sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Dimana 0 < IW < 1
IW = Indeks Williamson
Yi = Pendapatan perkapita kabupaten/kota i
Y=Pendapatan per kapita propinsi
fi =Jumlah penduduk di kabupaten/kota i
n = Jumlah penduduk propinsi

Jika IW mendekati 0-0,34 termasuk tingkat ketimpangan rendah. Jika IW antara 0,35-0,80 termasuk tingkat ketimpangan sedang. Jika IW diatas 0,80 termasuk tingkat ketimpangan sangat tinggi.

Untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan ekonomidigunakan Korelasi Pearson dimana pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 21.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah, dimana besar kecilnya PDRB per kapita tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai PDRB dan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. Artinya apabila persentase pertambahan PDRB lebih besar dari persentase pertambahan penduduk maka PDRB per kapitanya akan semakin besar, begitu sebaliknya.

Selama sepuluh tahun terakhir, yaitu tahun 2004 sampai dengan 2013, jumlah penduduk di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan, dengan persentase pertumbuhan penduduk yang bervariasi. Jumlah penduduk di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi selama tahun 2004 sampai 2013 dapat dilihat pada lampiran 1.

Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kabupaten Muaro Jambi yaitu sebesar 3,57% per tahun, sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitusebesar 0,47% per tahun. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi secara keseluruhan yaitu sebesar 2,66% per tahun maka kabupaten yang memiliki pertumbuhan penduduk diatas pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi adalah Kabupaten Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tebo dan Bungo. Sedangkan Kabupaten Kerinci, Batang Hari, Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh memiliki pertumbuhan penduduk dibawah pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi.

Selain jumlah penduduk variabel yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi adalah pendapatan per kapita. Dari tahun 2004 sampai 2013 terjadi kenaikan PDRB per kapita di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi sebagaimana terlihat pada lampiran 2.

Dari Tabel pada lampiran 2 terlihat bahwa selama periode penelitian yaitu tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 telah terjadi kenaikan PDRB per kapita di seluruh kabupaten/kota, kecuali pada tahun 2007 terjadi penurunan PDRB per kapita di Kabupaten Kerinci sebesar 29,26 % dibandingkan tahun 2006. Pada tahun 2009 terjadi pemekaran wilayah dimana Kabupaten Kerinci dimekarkan menjadi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Meskipun demikian PDRB per kapita kedua daerah

tersebut tetap mengalami peningkatan hingga tahun 2013.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan kabupaten dengan pendapatan per kapita tertinggi dengan rata-rata sebesarRp 10.844.021,66. Hal ini dikarenakan adanya kontribusi yang besar dari sektor pertambangan dan penggalian terutama subsektor pertambangan migas. Kemudian diikuti oleh sektor pertanian dan industri pengolahan yang didominasi oleh subsektor pengilangan migas (BPS 2012:12).Adapun kabupaten dengan pendapatan per kapita terendah adalah Kabupaten Tebo yaitu sebesar Rp 3.091.179,64. Struktur ekonomi Kabupaten Tebo didominasi oleh sektor pertanian terutama sub sektor tanaman perkebunan yaitu perkebunan kelapa sawit dan karet (BPS 2012:16) , namun sarana dan prasarana perekonomian di daerah ini belum berkembang dengan baik dibandingkan daerah lain.

Jika dibandingkan dengan rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Jambi selama sepuluh tahun terakhir hanya empat kabupaten/kota dari sebelas kabupaten/kota yang ada atau hanya sebesar 36,36 % yang memiliki rata-rata pendapatan per kapita diatas rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Sedangkan tujuh kabupaten/kota yang lain atau sebesar 63,64 % memiliki rata-rata pendapatan per kapita dibawah rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Jambi.

Dari hasil perhitungan ketimpangan pendapatan regional dengan menggunakan Indeks Williamson dimana dalam perhitungannya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan per kapita dan jumlah penduduk di masing-masing wilayah diketahui Indeks Williamson Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama tahun 2004 sampai 2013 dapat dilihat pada tabel 4.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa selama periode penelitian Indeks Williamson kabupaten/kota di Provinsi Jambi berfluktuasi dan tergolong dalam ketimpangan sedang. Ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar0,55 dan terendah pada tahun 2009 sebesar 0,36. Apabila dilihat dari persentase perkembangannya, peningkatan tertinggi terjadi dari tahun 2004 ke tahun 2005 yaitu sebesar 43,24 %. Indeks Williamson ini selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2006 sebesar 28,30 %. Selanjutnya mengalami peningkatan kembali hingga tahun 2008. Pada tahun 2009 kembali mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 34,55%. Ketimpangan pendapatan ini kembali meningkat pada tahun 2010 dan 2011. Persentase perkembangannya kembali menurun pada tahun 2012 dan hal ini tidak mengalami perubahan hingga tahun 2013.

Tabel 4
Indeks WilliamsonKabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2004-2013

Tahun	Indeks Williamson	Perkembangan (%)
2004	0,37	-
2005	0,53	43,24
2006	0,38	(28,30)
2007	0,39	2,63
2008	0,55	41,03
2009	0,36	(34,55)
2010	0,40	11,11
2011	0,42	5
2012	0,40	(4,76)
2013	0,40	0
Rata-rata	0,42	

Sumber : hasil olahan data

Nilai Indeks Williamson rata-rata sebesar 0,42 menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi cukup merata.

Besar kecilnya ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten/kota dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan perkembangan pembangunan di Provinsi Jambi, terutama perkembangan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Kegiatan perekonomian di setiap kabupaten/kota tumbuh karena berbagai macam kegiatan ekonomi yang timbul di daerah tersebut.Untuk menganalisis ekonomi suatu region,kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam sembilan sektor/lapangan usaha yang terdiri dari : (1) sektor pertanian (2) sektor pertambangan (3)

sektor industri (4) sektor listrik (5) sektor bangunan (6) sektor perdagangan (7) sektor pengangkutan (8) sektor lembaga keuangan, dan (9) sektor jasa-jasa. Pengelompokan tersebut menggambarkan sektor-sektor ekonomi yang menentukan dan berpengaruh dalam kehidupan ekonomi di wilayah yang bersangkutan.

Keadaan ekonomi Provinsi Jambi merupakan resultan semua perubahan, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten dan kota, sehingga semua perubahan di kabupaten/kota secara agregatif menggambarkan perubahan yang terjadi di Provinsi Jambi.

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Dari hasil analisis korelasi (Korelasi Pearson) antara pertumbuhan PDRB dengan Indeks Williamson diperoleh nilai -0,004 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.
Korelasi Pearson antara Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Williamson

Korelasi	Pertumbuhan PDRB	Signifikansi
Indeks Williamson	-0,004	0,990

Sumber : data diolah dari Tabel 1 dan Tabel 4

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang lemah antara pertumbuhan ekonomi dan Indeks Williamson. Nilai negatif menunjukkan adanya korelasi negatif antara pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini pertumbuhan PDRB dengan Indeks Williamson sebagai ukuran ketimpangan pembangunan ekonomi yang ditinjau dari sudut pendapatan regional. Apabila dilihat dari signifikansi maka korelasi ini tidak signifikan pada $\alpha = 10\ \%$. Hal ini menunjukkan tidak ada hubungan yang berarti antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan regional. Secara teoritis pembangunan yang lebih merata. Namun demikian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu memperburuk distribusi pendapatan karena hal ini dapat dipengaruhi juga oleh karakter pertumbuhan ekonomi (*character of economic growth*) diantaranya yaitu bagaimana cara mencapainya, siapa yang berperan serta, sektor-sektor mana saja yang mendapat prioritas, lembaga-lembaga apa yang menyusun dan yang mengatur, yang menentukan apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perbaikan taraf kehidupan masyarakat miskin atau tidak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode penelitian 2004-2013ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi termasuk dalam kriteria ketimpangan sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di wilayah tersebut cukup merata. Selain itu diketahui pula bahwa terdapat hubungan (korelasi) negatif yang rendah antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Implikasi dari hal tersebut diatas hendaknya dalam menentukan kebijakan pembangunan, pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi lebih mengutamakan daerah-daerah yang relatif tertinggal dari sisi pembangunan wilayah, khususnya dengan strategi penanggulangan kemiskinan dan membuka isolasi daerah, antara lain melalui peningkatan sarana dan prasaran perekonomian daerah. Sementara itu, untuk daerah yang mengalami kemajuan yang cepat dan berkembang perlu adanya strategi menarik investasi dan peningkatan promosi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

_____**Jambi Dalam Angka 2005**, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi

_____**Jambi Dalam Angka 2006**, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi

_____**Jambi Dalam Angka 2007**, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi

_____**Jambi Dalam Angka 2008**, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi

_____**Jambi Dalam Angka 2009**, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi

_____**Jambi Dalam Angka 2010**, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi

_____**Jambi Dalam Angka 2011**, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi

_____**Jambi Dalam Angka 2012**, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi

_____**Jambi Dalam Angka 2013**, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi

_____**Jambi Dalam Angka 2014**, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi

----------**Tinjauan Ekonomi Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi Tahun 2002-2006**, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi

----------**Tinjauan Ekonomi Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi Tahun 2002-2006**, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi

----------**Tinjauan Ekonomi Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi Tahun 2007-2011**, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi

----------**Tinjauan Ekonomi Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi Tahun 2008-2012**, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, JambI

----------**Tinjauan Ekonomi Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi Tahun 2009-2013**, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi.

Djohanputro, Bramantyo, 2006, **Prinsip-prinsip Ekonomi Makro**, PPM, Jakarta

Kuncoro, Mudrajad, 2004, **Otonomi dan Pembangunan Daerah**, Erlangga, Jakarta

----------,2010, **Ekonomika Pembangunan**, Erlangga, Jakarta

Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith, 2006, **Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi 9**,Erlangga, Jakarta

Lampiran 1
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Prov. Jambi

Tahun	Kerinci	Merangin	Sarolangun	Batang Hari	Muaro Jambi	Tanjung Jabung Timur
2004	303.120	275.534	195.909	209.817	274.691	203.402
2005	304.827	278.628	198.822	212.069	280.140	205.389
2006	306.494	277.595	205.090	211.897	295.319	207.340
2007	308.291	281.476	209.851	215.336	306.754	209.477
2008	310.093	286.578	214.036	219.181	310.676	211.789
2009	233.719	292.013	218.228	222.841	314.598	213.781
2010	229.495	333.206	246.245	241.334	342.952	205.272
2011	235.251	341.563	252.421	247.386	351.553	210.420
2012	235.797	350.062	259.963	252.731	363.994	211.057
2013	326.272	358.530	267.549	258.016	376.619	212.218
Pertumbuhan (%)	2,00	2,97	3,53	2,32	3,57	0,47

Sumber : Jambi Dalam Angka (beberapa terbitan)

Lanjutan.

Tahun	Tanjung Jabung Barat	Tebo	Bungo	Kota Jambi	Kota Sungai Penuh	Provinsi Jambi
2004	228.514	235.206	241.392	451.968	-	2.619.553
2005	236.095	238.784	242.355	460.427	-	2.657.536
2006	239.016	246.044	250.934	443.370	-	2.683.099
2007	245.559	250.057	257.087	458.308	-	2.742.196
2008	250.746	253.373	264.389	467.408	-	2.788.269
2009	255.952	257.267	271.625	476.038	78.102	2.834.164
2010	278.741	297.735	303.135	531.857	82.293	3.092.265
2011	285.731	305.202	310.737	545.193	84.357	3.169.814
2012	293.594	313.420	320.300	557.321	84.575	3.242.814
2013	301.469	321.641	329.934	569.331	84.965	3.317.034
Pertumbuhan (%)	3,12	3,53	3,53	2,60	2,13	2,66

Sumber : Jambi Dalam Angka (beberapa terbitan)

Lampiran 2
PDRB per kapita Kabupaten/Kota Provinsi Jambi
Tahun 2004-2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Juta Rupiah)

Tahun	Kerinci	Merangin	Sarolangun	Batang Hari	Muaro Jambi	Tanjung Jabung Timur
2004	3.934.569,47	2.926.222,31	4.074.086,95	4.078.640,20	3.178.154,10	8.745.499,50
2005	4.121.295,99	3.113.260,08	4.226.318,74	4.374.530,07	3.221.564,83	9.032.178,41
2006	4.334.319,12	3.215.389,84	4.443.761,79	4.502.260,90	3.250.878,69	9.445.773,67
2007	3.006.291,26	3.393.055,00	4.659.029,00	4.674.623,00	3.281.252,00	9.770.250,00
2008	4.809.199,00	3.532.437,00	4.916.147,00	4.879.103,00	3.411.975,00	10.215.262,00
2009	4.533.637,00	3.758.522,00	5.126.222,00	5.045.748,00	3.552.504,00	10.626.269,00
2010	4.888.941,00	3.552.451,00	5.001.630,00	4.940.952,00	3.391.947,00	11.706.252,00
2011	5.042.035,00	3.801.821,00	5.308.542,00	5.200.627,00	3.721.236,00	12.199.351,00
2012	5.356.367,00	3.853.062,00	5.557.515,00	5.452.496,00	3.933.374,00	13.067.562,00
2013	5.773.161,00	4.054.843,00	5.859.610,00	5.804.709,00	4.004.813,00	13.631.819,00
Rata-rata	4.585.981,58	3.520.106,32	4.917.286,25	4.895.368,92	3.494.769,86	10.844.021,66

Sumber : Tinjauan Ekonomi Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi (beberapa terbitan)

Lanjutan

Tahun	Tanjung Jabung Barat	Tebo	Bungo	Kota Jambi	Kota Sungai Penuh	Provinsi Jambi
2004	6.533.689,67	2.680.668,89	3.375.013,63	5.239.721,89	-	4.553.309,53
2005	6.991.667,76	2.750.263,20	3.524.050,96	5.736.479,36	-	4.803.553,54
2006	7.284.355,06	2.827.709,34	3.706.315,44	5.989.122,08	-	4.980.313,61
2007	7.677.733,00	3.082.533,00	3.974.106,00	6.208.815,00	-	5.205.741,00
2008	7.969.220,00	3.227.036,00	4.294.358,00	6.461.435,00	-	5.486.476,00
2009	8.305.669,00	3.337.359,00	4.447.443,00	6.754.485,00	6.640.164,00	5.742.402,00
2010	8.150.815,00	3.055.586,00	4.253.176,00	6.448.386,00	6.679.911,00	5.649.792,00
2011	8.575.206,00	3.182.894,00	4.467.815,00	6.728.996,00	6.955.233,00	5.560.247,00
2012	8.986.517,00	3.301.530,00	4.659.967,00	7.046.842,00	7.414.154,00	6.282.671,00
2013	9.497.295,00	3.466.217,00	4.885.534,00	7.555.534,00	7.861.046,00	6.688.621,00
Rata-rata	7.997.216,75	3.091.179,64	4.158.777,90	6.416.981,63	7.110.101,60	5.495.312,67

Sumber : Tinjauan Ekonomi Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi (beberapa terbitan)